



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 05 Februari 2021

Halaman: 1

PENERAPAN TAK SERAGAM, JAM BUKA TEMPAT USAHA DIKELUHKAN
DPRD DIY Nilai Aturan PTKM
Membbingungkan

YOGYA (MERAPI). DPRD DIY menilai aturan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) khususnya jam operasional tempat usaha tidak sinkron dan ambigu. Hal inilah yang membingungkan masyarakat. Untuk itu, Pemda DIY dituntut tegas membuat aturan.

Ketua DPRD DIY Nuryadi kepada wartawan Kamis (4/2) menjelaskan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan jam operasional. Sesuai Pergub, hanya diperbolehkan 25 persen kapasitas pengunjung serta setelah pukul 20.00 hanya melayani pesan antar atau take away. Di sisi lain, ada penerapan aturan PTKM di Kabupaten/ Kota

DPRD DIY saat menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 Pemda DIY membahas kelanjutan PTKM, Kamis (4/2).

yang mengatur semua pelaku usaha harus tutup pukul 20.00.

Nuryadi mengatakan, hal itu sangat membingungkan dan merugikan masyarakat. Dia meminta sebaiknya agar aturan itu hanya dibuat Pemda DIY dan diterapkan utuh oleh Kabupaten/Kota sehingga tidak berbeda-beda dan tumpang tindih.

"Kita lebih kepada bagaimana itu covidnya, tapi kita juga harus berpikir bagaimana ekonominya. Mestinya pemerintah punya cara, sebenarnya kan tidak harus tutup jam 7 (malam)," katanya, Kamis (4/2) di DPRD DIY.

Ditambahkan, menjadi aneh

*Bersambung ke halaman 9

DPRD DIY Sambungan halaman 1

apabila ada kebijakan di Kota Yogyakarta namun aturan PTKM-nya berasal dari Pemda DIY. Misalnya tempat usaha dari Tugu Pal Putih sampai titik nol tidak perlu tutup pukul 20.00. Nuryadi mempertanyakan pembuatan aturan tersebut.

"Ternyata ada kebijakan yang tidak sesuai dengan SK Kabupaten atau Kota. Jangan sampai satu buka jam segini dan satu dibiarkan hanya sampai 25 persen pengunjungnya. Sehingga saya lebih ingin mengatakai bahwa pemerintah provinsi harus berani lebih tegas untuk menyampaikan itu," imbuhnya.

Sementara itu, Sekda DIY Baskara Aji mengatakan keputusan lanjut atau tidaknya PTKM menunggu hasil pertemuan antara Sultan HB X dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu digelar kemarin Rabu (3/2).

"Pertama kita sangat tergantung keputusan pusat, kemarin 5 Gubernur rapat bersama dengan presiden, tentu nanti hasilnya kita tunggu seperti apa sebagai tindak lanjut di daerah," ucapnya.

Aji mengklaim meski kasus positif Covid-19 masih di angka ratusan setiap harinya, namun jumlah kasus sembuh juga meningkat. Menurutnya, bisa saja angka penularan tinggi apabila tidak dilakukan PTKM.

"Saya kira penambahasan konfirmasi positif diimbangi kesembuhan. Walaupun yang sakit 200 kalau bisa meningkatkan kesembuhan 300 berarti kan pengurangan jumlah pasien," katanya.

"Kalau kita gak lakukan itu (PTKM) penambahan mungkin lebih 2 kali lipat dari itu," tandasnya.

(C-4)

1. *On Ker*
2. *SPBD*
3. *Satpol PP*
4. *Supriatna*
5.

Nilai
☐ N
☐ P
☐ N

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005